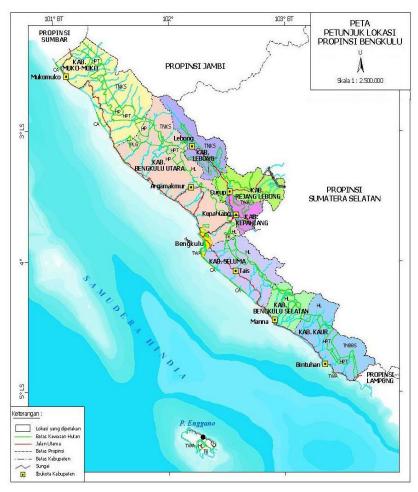
BAB IV

GAMBARAN UMUM

A. Kondisi Geografis

Menurut letak astronomis, Provinsi Bengkulu terletak antara 2°16'9" - 3°31'17" Lintang Selatan dan 101°01'0" - 103°41'5" Bujur Timur.



Sumber: Provinsi Bengkulu dalam angka 2017

GAMBAR 4.1 Petah Wilayah Provinsi Bengkulu

Berdasarkan gambar 4.1, Provinsi Bengkulu yang beribukotakan Kota Bengkulu merupakan provinsi yang terbentuk pada 18 November 1968, setelah sebelumnya menjadi karesidenan di Provinsi Sumatra Selatan.

Provinsi Bengkulu terletak di sisi Barat pegunungan Bukit Barisan, luas wilayah Provinsi Bengkulu lebih kurang 1.991.922 hektar atau 19.919,33 km³. Provinsi Bengkulu merupakan wilayah yang mamanjang dari perbatasan Provinsi Sumatera Barat hingga perbatasan Provinsi Lampung yang berjarak lebih kurang 567 km. Batas-batas wilayah Provinsi Bengkulu, sebelah utara berbatasan dengan Sumatera Barat, sebelah selatan berbatasan dengan Samudera Indonesia dan Provinsi Lampung, di sebelah barat berbatasan dengan Samudera Indonesia, dan disebelah timur berbatasan dengan Provinsi Jambi dan Provinsi Sumatera Selatan.

Provinsi Bengkulu berbatasan langsung dengan Samudera Indonesia pada garis pantai sepanjang lebih kurang 525 km. Bagian timur berbukit-bukit dengan dataran tinggi subur, dan bagian barat merupakan dataran rendah yang sempit, memanjang dari utara ke selatan diselingi daerah yang cenderung bergelombang.

Secara administratif, Provinsi Bengkulu terdiri dari 9 pemerintah kabupaten dan 1 perintah kota, beserta perangkat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Pemerintah kabupaten dan kota membawahi pemerintah kecamatan dan desa/kelurahan. Pemerintah kabupaten/kota tersebut sebagai berikut:

a. Kabupaten Bengkulu Selatan : Ibukota Manna

b. Kabupaten Rejang Lebong : Ibukota Curup

c. Kabupaten Bengkulu Utara : Ibukota Arga Makmur

d. Kabupaten Kaur : Ibukota Bintuhan

e. Kabupaten Seluma : Ibukota Tais

f. Kabupaten Lebong : Ibukota Tubei

g. Kabupaten Kepahiang : Ibukota Kepahiang

h. Kabupaten Mukomuko : Ibukota Mukomuko

i. Kabupaten Bengkulu Tengah : Ibukota Karang Tinggi

j. Kota Bengkulu : Ibukota Bengkulu

Tabel 4.1Pembagian Wilayah Administrasi Provinsi Bengkulu
Tahun 2018 (unit)

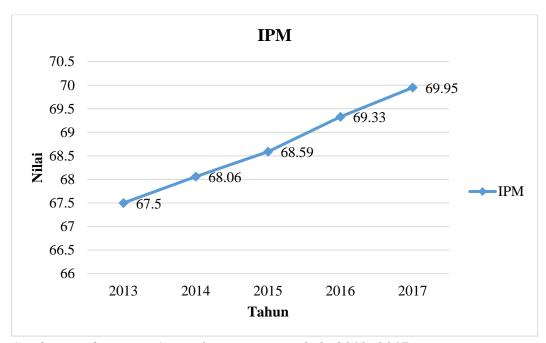
Kabupaten/Kota	2018	
	Jumlah Kecamatan	Jumlah Desa/kelurahan
Bengkulu Selatan	11	158
Rejang Lebong	15	156
Bengkulu Utara	19	220
Kaur	15	195
Seluma	14	202
Mukomuko	15	152
Kepahiang	8	117
Lebong	12	104
Bengkulu Tengah	10	143
Kota Bengkulu	9	67
Jumlah	128	1.514

Sumber: BPS, Provinsi Bengkulu dalam Angka 2018

Berdasarkan tabel 4.1, jumlah kecamatan terbanyak terletak di Kabupaten Bengkulu Utara dengan jumlah 19 kecamatan dan desa/kelurahan terbanyak terletak di Kabupaten Bengkulu Utara yaitu sejumlah 220 unit pada tahun 2018.

B. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Pembangunan manusia bertujuan untuk memperluas pilihan-pilihan masyarakat agar dapat hidup layak. Tujuan tersebut tercapai saat setiap individu memperoleh peluang yang luas untuk hidup sehat dan panjang umur, berpendidikan, dan memiliki pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Bagi Indonesia, keberadaan Indeks Pembangunan Manusia menjadi strategis karena pembangunan pada hakekatnya merupakan pembangunan manusia, pembangunan manusia di Indonesia masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan negara lain, dan pengeluaran pemerintah untuk bidang kesehatan dan bidang pendidikan masih tergolong rendah.



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Bengkulu 2013- 2017

Gambar 4.2 Grafik Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Bengkulu

Dari grafik diatas menunjukan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Bengkulu selalu mengalami peningkatan pada setiap tahunnya. Seperti pada tahun 2013 IPM Provinsi Bengkulu sebesar 67,50 poin, pada tahun 2014 sebesar 68,06 poin, pada tahun 2015 sebesar 68,59 poin, pada tahun 2016 sebesar 69,33 poin, dan pada tahun 2017 sebesar 69,95 poin. Meningkatnya IPM pada tiap tahunnya tidak terlepas dari kerjasama semua elemen masyarakat serta kinerja yang optimal dari pemerintah.

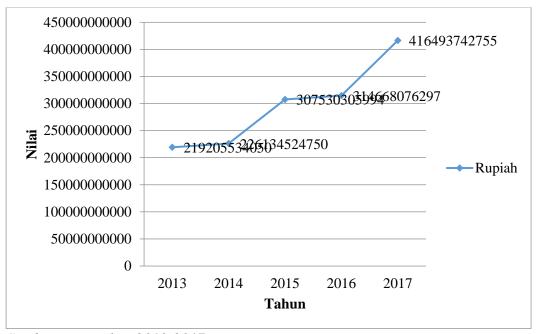
Indeks Pembangan Manusia (IPM) merupakan salah satu indikator untuk melihat perkembangan manusia, dengan tersedianya sumberdaya manusia (SDM) yang berkualitas akan dapat mendorong kemajuan perekonomian di Provinsi Bengkulu.

C. Anggaran Pemerintah di Bidang Kesehatan

Belanja pemerintah meliputi semua pngeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah dikurangi ekuitas dana, dan merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun. Belanja daerah dibagi menjadi belanja rutin dan belanja pembangunan. Belanja pemerintah di bidang pendidikan dan belanja pemerintah di bidang kesehatan merupakan belanja pembangunan karena bertujuan sebagai investasi pemerintah.

UUD 1945 menyatakan bahwa kesehatan merupakan hak dasar manusia, sehingga pemerintah harus bertanggungjawab untuk memenuhi kebutuhan berupa perlindungan dan fasilitas kesehatan kepada semua masyarakatnya.

Tujuan pembangunan nasional menyatakan bahwa setiap penduduk berhak mendapatkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Kesehatan merupakan investasi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Kekurangan nutrisi atau rendahnya derajat kesehatan akan menghasilkan kualitas manusia yang rendah dengan tingkat mental yang terbelakang. Oleh karena itu, diperlukan anggaran khusus untuk meningkatkan pelayanan dan sarana kesehatan melalui belanja pemerintah.



Sumber: Kemenkeu 2013-2017

Gambar 4.3Grafik Anggaran Pemertintah di Bidang kesehatan

Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa porsi anggaran Pemerintah di Bidang Kesehatan terus mengalami peningkatan setiap tahunnya seperti pada tahun 2013 sebesar 219,205,534,050 di tahun 2014 mengalami sedikit peningkatan sebesar

226,134,524,750 tahun 2015 sebesar 307,530,305,994 tahun 2016 sebesar 314,668,076,297 dan pada tahun 2017 sebesar 416,493,742,755 dari total anggaran belanja pemerintah di Provinsi Bengkulu.

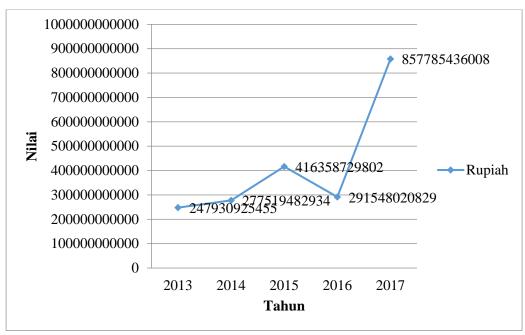
Belanja pemerintah memiliki fungsi alokasi, yaiitu alokasi untuk memenuhi permintaan masyarakat terhadap sarana dan prasarana pelayanan publik. Selain di bidang kesehatan, belanja pemerintah di bidang pendidikan juga penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Indikator lain untuk melihat pembangunan yang berorientasi pada manusia adalah kondisi kesehatan masyarakat. Kesehatan masyarakat dapat didukung selain dari masyarakat itu sendiri juga didukung adanya kemudahan akses masyarakat terhadap fasilitas kesehatan. Dimulai dengan adanya puskesmas di setiap kecamatan hingga rumah sakit daerah. Fasilitas kesehatan sendiri merupakan salah satu barang publik yang disediakan pemerintah.

D. Fasilitas Umum

Peran fasilitas Umum dalam kemajuan suatu bangsa sangatlah penting karena dengan fasilitas umum yang dapat memudahkan hubungan komunikasi dan proses mobilisasi masyarakat dalam menunjang distribusi barang dan jasa sehingga berdampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi, terutama pada daerah yang sulit dijangkau.

Karena tanpa kita sadari semua kegiatan tersebut sangat bergantung pada keadaan fasilitas umum yang baik, setiap orang mampu untuk memperoleh kemudahan akses dalam kegiatan sehari-hari dan mampu meningkatkan produktifitas.



Sumber: Kemenkeu 2013-2017

Gambar 4.4Grafik Fasilitas Umum

Dari graifk diatas menunjukan bahwa Fasilitas Umum di Provinsi Bengkulu pada tahun 2013-2017 berfluktuasi, penurunan terjadi cukup besar pada tahun 2016 sebesar 291,548,020,829 yang mana sebelumnya di tahun 2015 sebesar 416,358,729,802 hingga ditahun 2017 kembali mengalami peningkatan yaitu sebesar 857,785,436,008.

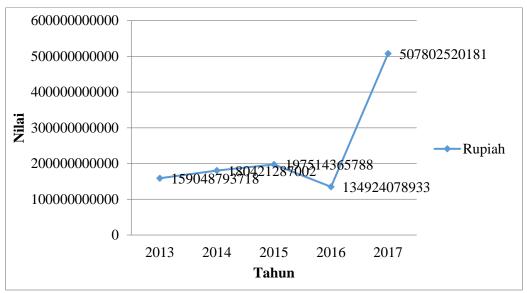
Dari penjelasan di atas peran pemerintah sangat diperlukan dalam situasi seperti ini, salah satunya adalah pemerintah melakukan pembelanjaan untuk kesehatan fasilitas umum. Dengan harapan semakin besarnya belanja pemerintah

untuk fasilitas umum akan meningkatkan efisiensi, dan berdampak pada daya saing yang pada akhirnya meningkatkan indeks pembangunan manusia di Provinsi Bengkulu.

E. Anggaran Pemerintah di Bidang Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu faktor yang sangat penting bagi kemajuan suatu bangsa, sebagai mana di atur dalam undang-undang no 20 tahun 2013 tentang sistem pendidikan nasional. Dalam bidang pendidikan variabelvariabel seperti jumlah sekolah, jumlah guru dan jumlah murid seringkali di munculkan sebagai gambaran situasi suatu pendidikan Pemerintah memiliki peran dalam mengalokasikan serta mendistribusikan dananya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam bidang pendidikan agar terciptanya sebuah pembangunan yang lebih baik terutama di bidang pendidikan agar supaya bisa memaksimalkan fungsi dan peran pendidikan di suatu daerah, dengan demikian pendidikan di suatu daerah bisa mengasilkan dan mencetak generasi yang lebih berintegritas dan berkompetan dalam semua bidang.

Menurut UU SISIKNAS NO.20 tahun 2003 pendidikan merupakan suatu usaha yang dilakukan secara sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mampu mengembangkan potensi yang ada didalam dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, kepribadian yang baik, pengendalian diri, berakhlak mulia, kecerdasan dan keterampilan yang diperlakukan oleh dirinya dan masyarakat.



Sumber: Kemenkeu 2013-2017

Gambar 4.5Grafik Anggaran Pemerintah di Bidang Pendidikan

Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa proporsi Anggaran Pemerintah di Bidang Pendidikan di Provinsi Bengkulu mengalami kenaikan pada tahun 2013 sampai 2015, tahun 2013 sebesar 159,048.793,718 tahun 2014 sebesar 180,421,287,002 dan ditahun tahun 2015 sebesar 197,514,365,788, tahun 2016 Anggaran Pemerintah di Bidang Pendidikan mengalami penurunan sebesar 134,924,078,933 hingga pada tahun 2017 mengalami peningkatan yang cukup besar menjadi 507,802,520,181. Artinya dari data di atas dapat kita lihat bahwasanya proporsi anggaran Belanja Pemerintah di Bidang Pendidikan di Provinsi Bengkulu masih berfluktuasi.

Dari penjelasan di atas kita dapat melihat bahwa peran pemerintah sangat diperlukan dalam situasi seperti ini, besar harapan masyarakat agar pemerintah

bisa lebih mengoptimalakan lagi kinerjanya dalam menyikapi permasalahan seperti ini, agar kualitas pendidikan di Provinsi Begkulu bisa jauh lebih baik lagi kedepannya, karena dari pendidikan yang baiklah bisa menciptakan masyarakat kedepannya yang lebih baik pula, sehingga bisa menciptakan generasi yang berintelektual di kemudian hari.